

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BUS SEKOLAH GRATIS OLEH UPTD PERHUBUNGAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Muhammad Ilham¹, M.Fachri Adnan², Nora Eka Putri³

¹) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25171

²) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25171

³) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25171

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 26 Januari 2019

Direvisi: 29 Januari 2019

Diterbitkan: Februari 2019

KATA KUNCI

Kebijakan, Program Bus Sekolah
Gratis, Kecamatan Mandau

KORESPONDEN

No. Telepon: 0812 7735 0100

E-mail: -

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/teknik Purposiv Sampling, dimana pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh nantinya bisa representatif. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Evaluasi dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau, untuk mengkomunikasikan informasi mengenai pelaksanaan bus sekolah gratis disampaikan langsung oleh pihak UPTD Perhubungan kepada masing-masing sekolah melalui kepala sekolah, dengan sumberdaya pelaksana program bus sekolah gratis merupakan pihak UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau, namun struktur organisasi pelaksana program belum ada. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bus sekolah gratis dilihat dari segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan sudah cukup baik, serta sarana dan prasarana seperti halte telah tersedia.

PENDAHULUAN

Angkutan merupakan kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana kendaraan (Wahab,2008). Perangkutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung, mendorong dan menunjang aspek kehidupan dan penghidupan, baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Dalam pelayanan jasa angkutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (*volume*) barang maupun orang yang memerlukan angkutan (Abidin, 2012).

Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan kualitas jalan yang ada ataupun pengetahuan tentang tertib berlalu lintas yang baik maka secara tidak langsung dapat menimbulkan berbagai masalah di bidang lalu lintas seperti sering terjadinya pelanggaran tata tertib berlalulintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan jasa transportasi/angkutan. Namun saat ini, angkutan umum (angkutan kota) cenderung ditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan minimnya tingkat pelayanan yang diberikan oleh operator angkutan kota. Melihat kondisi pelayanan angkutan kota yang semakin rendah, sehingga mempengaruhi para pelajar yang lebih memilih menggunakan sepeda motor saat ke sekolah daripada menggunakan angkutan kota.

Semakin banyaknya para pelajar yang mengendarai sepeda motor menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Menanggapi fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau menyediakan sarana angkutan bus sekolah gratis. Pengadaan bus sekolah gratis ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan pelajar di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor sehingga bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan

lalu lintas. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mempermudah para pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menuju sekolah mereka masing-masing terutama mereka yang sekolahnya tidak dilalui oleh angkutan umum tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Pengadaan bus sekolah ini dilakukan oleh UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang disetujui untuk direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Namun biaya operasional, gaji supir maupun bahan bakar dianggarkan pada APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2016. Adapun besar anggaran yang diberikan untuk pengadaan bus ini yaitu 1,2 Milyar untuk 2 Unit serta biaya pemeliharaan ringan sebesar 7,5 Juta per unit untuk satu tahun, serta untuk operasional supir dan kernet di anggarakan sebesar 2,4 Juta perbulan untuk perorangan (Dinas Perhubungan, Kabupaten Bengkalis, 2016).

Pelaksanaan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar ini sudah dimulai sejak awal Februari 2016 dan pengawasan dilakukan langsung oleh pihak UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pada tahap perencanaannya disediakan enam unit armada bus untuk memenuhi kebutuhan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, namun ketika kebijakan pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar ini dijalankan baru dua unit armada bus yang terealisasi. Hal ini ditandai dengan dibeli dan dioperasikannya dua unit bus New Coaster berwarna kuning buatan pabrik Mitsubishi type FE 84G BC, dengan dua unit bus yang beroperasi menyebabkan penumpukan pelajar didalam bus sehingga mengganggu kenyamanan. Selain itu halte yang direncanakan dibangun ada 14 namun yang terealisasikan 2 unit halte.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Agustino, 2008:7).

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor yang terlibat dalam bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2016:19). Menurut, Abidin (2002;39) ada beberapa ciri dari kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan harus ada tujuannya
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah
4. Kebijakan harus didasarkan pada hukum.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas, hal ini disebabkan karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, jika dilihat dari hirarkienya kebijakan publik dapat bersifat regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Winarno (2016;17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan

bentuk-bentuk kebijakan lainnya misalnya kebijakan swasta.

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah dan implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan besar bagi pejabat atas untuk mendorong pejabat bawah untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan kebijakan Menurut, As'ari(2007;47).

Pengertian implementasi menurut, Wahab (2008;29) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan keputusan kebijakan. Menurut Dunn (2003:58), implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapai hasil kebijakan. implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku seluruh pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak positif maupun negatif yang dihasilkan, sehingga dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi memerlukan kesamaan pandangan terhadap

tujuan yang hendak dicapai dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan mampu mencapai tujuan. Implementasi dari sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya baik itu alam, manusia maupun biaya yang diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Teori implementasi menurut Dunn (2003:58), bahwa terdapat empat variabel kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggung dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantaranya para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan (bagaimana hubungan yang dilakukan).
- 2) Sumber daya : ini berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu:
 - a. Sumber daya manusia : merupakan aktor utama/penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang keberadaannya melekat pada seseorang yang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pendidikan, pengalaman, keahlian, keterampilan maupun hubungan personal
 - b. Informasi : merupakan sumber daya kedua yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima harus jelas agar dapat mempermudah proses implementasi sebuah kebijakan
 - c. Kewenangan : merupakan hak aktor kebijakan yang terlibat untuk mengambil keputusan maupun memberi perintah
 - d. Sarana dan prasarana : yaitu alat pendukung dan pelaksana dari suatu kegiatan. Sarana dan prasarana juga dapat disebut sebagai perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi untuk membantu para pekerja dalam melaksanakan kegiatan mereka
 - e. Pendanaan : ini terkait dengan pembiayaan operasional proses implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi mengenai bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan, serta kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan agar para implementor tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan : ini berhubungan dengan ketersediaan para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak akan mencukupi tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan, antara apa yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan yang diberikan terhadap

kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

- 4) Struktur birokrasi : berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan pelaksana kebijakan serta tugas mereka, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan *Standart Operational Procedure* (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, namun juga dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Untuk memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi publik. terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu:

- a. SOP (*Standart Operational Procedure*) : merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas
- b. Fragmentasi : merupakan penyebaran dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk menjelaskan kebijakan, maka akan semakin berkurang kemungkinan keberhasilan kebijakan.

Program Bus Sekolah Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menyediakan transportasi angkutan umum gratis untuk siswa/siswa sekolah dengan tujuan memudahkan akses siswa/siswa menuju sekolah, menguntungkan biaya ekonomi keluarga karena tidak perlu mengeluarkan uang

untuk ongkos transportasi ke sekolah. Selain itu program bus sekolah gratis ini juga bertujuan untuk mengurangi kebiasaan pelajar dibawah umur untuk membawa kendaraan sepeda motor sehingga bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas (Dishub Kabupaten Bengkalis, 2016)

Pemerintah dalam upaya untuk mengurangi kemacetan menyediakan alat transportasi angkutan umum yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang ada. Selain untuk mengurangi kemacetan, alat transportasi angkutan umum berfungsi agar masyarakat yang sering membawa kendaraan pribadi dapat berpindah ke alat angkutan umum seperti bus kota, mikrolet, dan lain-lain. (Oktavianus:2015)

Pelayanan yang efektif dapat diukur dengan mengacu pada standar pelayanan yang diatur oleh negara secara sah dalam suatu Undang-Undang agar dapat dilaksanakan oleh aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar Pelayanan yang telah diatur oleh Negara tersebut ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 141 paragraf 2 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang.

Adapun penjelasan selengkapnya tentang Standar Pelayanan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Di dalam Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang tersebut terdapat beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Keamanan

Terdiri dari Identitas kendaraan , Identitas awak kendaraan mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi, Kaca Film

- b. Keselamatan

Terdiri dari Keselamatan awak kendaraan, Standar Operasional Prosedur

pengoperasian kendaraan, Kompetensi Pengemudi

c. Sarana

Terdiri dari Peralatan keselamatan, Fasilitas kesehatan, Informasi tanggap darurat, Fasilitas pegangan penumpang berdiri

d. Kenyamanan

Terdiri dari Daya angkut, Fasilitas pengatur suhu ruangan, Fasilitas kebersihan, Keterjangkauan

Standar pelayanan minimal angkutan orang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan umum. Standar pelayanan minimal ini wajib dilaksanakan dikarenakan dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat harus memiliki pedoman agar pelaksanaan pelayanan tersebut bisa berjalan secara efektif.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan, mencatat, menjelaskan dan memaparkan bagaimana pelaksanaan program bus sekolah gratis yang dilaksanakan oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* berdasarkan pada karakteristik tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Bus Sekolah Gratis Oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau sesuai dengan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, karena RPJMD memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Evaluasi dalam pelaksanaan bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau, menurut Dunn (2003:58), menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

Pertama, Komunikasi tentang pelaksanaan bus sekolah gratis oleh UPTD Kecamatan Mandau sudah di informasikan dengan baik. Mulai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis memberikan teknis pelaksanaan kepada UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau sebagai pelaksana, dan UPTD Perhubungan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang akan dilalui oleh bus sekolah gratis, kemudian informasi tersebut disampaikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi yang ada disekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam mengkomunikasikan informasi mengenai pelaksanaan bus sekolah gratis telah

disampaikan dengan baik dari Kabupaten hingga siswa-siswa pengguna bus sekolah.

Kedua, sumberdaya pelaksanaan program bus sekolah gratis, mulai dari sumberdaya manusia pelaksana program bus sekolah gratis telah tersedia yang mana merupakan pegawai dari Kantor UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau. Pengawasan dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Sarana dan prasarana pelaksanaan bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau, telah tersedia 4 unit bus, namun yang beroperasi hanya 2 unit dan 2 unit lagi digunakan sebagai bus pengganti apabila terjadi kerusakan pada unit yang sedang beroperasi. Halte yang disediakan berjumlah 14 halte yang tersebar di Kecamatan Mandau. Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau berasal dari dana anggaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016. Adapun untuk pendanaan pengadaan bus sekolah gratis tersedia yaitu sebesar 1,2 miliar untuk 2 unit bus sekolah, dan untuk pemeliharaan ringan sebesar 7,5 juta per unit untuk 1 tahun, serta untuk operasional supir dan kernet dianggarkan sebesar 2,4 juta perbulan untuk setiap orang.

Ketiga, sikap dan komitmen pelaksana program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh jajaran baik itu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai pengawasan dan penanggungjawab program, UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau sebagai pelaksana, dan pihak sekolah beserta siswa-siswi sebagai penerima program bus sekolah gratis, mendukung, saling berkomitmen dan saling bekerja sama dalam mewujudkan dan melaksanakan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau.

Keempat, struktur birokrasi pelaksana program bus sekolah gratis di Kecamatan

Mandau, belum ada struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau. Dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai penanggungjawab pelaksana bus dan UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau sebagai pelaksana, dan langsung sopir bus sekolah gratis yang merupakan pegawai UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau sebagai tenaga operasional atau sopir bus.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bus Sekolah Gratis Oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau

Agar terwujudnya pelayanan angkutan atau program bus sekolah gratis yang baik maka menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang menyatakan bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan angkutan orang. Faktor tersebut juga yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau diantaranya faktor keamanan kendaraan, keselamatan, sarana dan kenyamanan.

Pertama, keadaan bus sekolah gratis yang membawa siswa-siswi pada beberapa sekolah di Kecamatan Mandau pada kondisi aman. Keamanan kendaraan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti mobil yang digunakan merupakan mobil baru, identitas sopir jelas dan menggunakan baju seragam, kemudian kendaraan terlihat pada gambar diatas tidak menggunakan kaca film untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan didalam kendaraan.

Kedua, dalam menjamin keselamatan pengguna bus sekolah gratis, pelaksana kebijakan menggunakan sopir yang sudah terlatih dalam mengendarai mobil bus dan telah memiliki SIM B1. Selain itu juga

ditekankan bahwa kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi dari 60 Km/jam untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan raya, walaupun untuk terjadinya musibah kecelakaan tidak dapat diprediksikan. Selaku pelaksana kebijakan tetap mengantisipasi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kendaraan dalam menjamin keselamatan pengguna bus sekolah gratis.

Ketiga, sarana penunjang dalam pengoperasian bus sekolah gratis seperti fasilitas keselamatan yaitu sabuk pengaman hanya tersedia untuk sopir saja untuk siswa-siswi pengguna bus sekolah hanya tersedia pegangan penumpang berdiri. Kemudian untuk menjaga suhu udara didalam bus, pengatur suhu kadang hidup kadang tidak. Bus sudah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti P3K dan tabung pemadam kebakaran untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain peralatan atau sarana-sarana penunjang yang telah disediakan oleh pelaksana kebijakan untuk kelancaran pengoperasian bus sekolah gratis, pada setiap kaca mobil juga di tempel informasi nomor telepon yang dapat dihubungi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama perjalanan, seperti nomor kantor polisi terdekat, pemadam kebakaran, dan kontak UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau.

Keempat, kenyamanan bus sekolah sering dioperasikan melebihi kapasitas. Standar yang telah ditetapkan yaitu maksimal 40 penumpang namun dalam pelaksanaannya siswa yang naik melebihi 40 orang dan keadaan didalam bus berdesakkan. Untuk akses siswa menuju halte bus atau rute bus sekolah cukup mudah dijangkau oleh siswa yang bertempat tinggal disekitar area beroperasinya bus sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan

program bus sekolah gratis oleh UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau dalam hal komunikasi penyampaian informasi program telah disampaikan dengan baik, sumberdaya pelaksana merupakan pihak UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau dengan dana berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis, semua *stakeholder* terkait memberikan dukungan dan komitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis, namun untuk struktur organisasi pelaksana program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau belum ada.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bus sekolah gratis dari segi keamanan sudah cukup baik karena bus dikendarai oleh pihak UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau yang sudah terampil dalam mengemudikan bus, didalam bus juga terdapat sarana penunjang keselamatan seperti P3K, sabuk pengaman, tabung pemadam api dan pegangan penumpang, namun kondisi didalam bus masih belum nyaman dikarenakan penumpang didalam bus sering melebihi kapasitas dari 40 orang penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Membuat struktur organisasi pelaksana serta penanggungjawab dalam pelaksanaan program bus sekolah gratis di Kecamatan Mandau.
2. Menambah jumlah unit kendaraan bus sekolah gratis untuk mengimbangi banyaknya siswa-siswi yang menggunakan bus sekolah dan halte.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- As'ari, Hasim. 2007. *Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru (kasus di Kecamatan Tenayan Raya)*. Tesis. PPS UNRI: Pekanbaru.

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Oktavianus Wijaya. 2015. “ Evaluasi program bus sekolah di Kota Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2015.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* Jakarta: Citra Utama.
- Uswatul Fitroh. 2016. “ Efektifitas Pelayanan Angkutan Bus Sekolah Gratis Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Blitar”. *Hasil Penelitian*. UNESA
- Wahab, Solichin. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bnadung: APII Bandung. Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2015 Tentang Angkutan Transportasi Umum.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress
- Wiratri. 2013. “ Efektifitas program siaran konseling di Radio Trijaya bagi Masyarakat Yogyakarta”. *Jurnal Ilmu komunikasi*. 2013.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Ilham

Lahir di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, 26 April 1994. Anak ke 5 dari 7 bersaudara, penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 042

Mandau, SMPN 01 Mandau, SMAN 02 Mandau, hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.